

BAB V

KESIMPULAN

Presiden Amerika Serikat selaku pemegang kekuasaan dipengaruhi oleh Partai dan kelompok kepentingan. Dengan maraknya perkembangan nuklir dibuatlah perjanjian yang dinamakan *Non Proliferation Treaty* (NPT) sebagai upaya nuklir damai. Nuklir Iran merupakan kelanjutan dari program *Atoms for Peace* Yang digalakan oleh Presiden Eisenhower pada tahun 1967. Iran diijinkan untuk mengembangkan nuklir oleh Amerika Serikat. Iran yang tergabung pada NPT memiliki hak untuk memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai. Semenjak 1979 terjadi Revolusi Islam Iran hubungan Amerika Serikat dan Iran buruk. Amerika Serikat menuduh Iran mengembangkan nuklir untuk menghasilkan senjata. Hal tersebut berulang kali dibantah Iran, bahkan penyelidikan yang dilakukan oleh IAEA sebagai institusi dibawah PBB pun menyatakan bahwa Energi Nuklir yang ada di Iran belum sampai tahap pembuatan senjata. Amerika Serikat mengajukan mosi tidak percaya. Bertahun-tahun Amerika Serikat memberi sanksi dan ancaman kepada Iran yang diikuti oleh Uni Eropa dan PBB atas desakan Amerika Serikat. Namun sanksi dan ancaman dari internasional tidak membuat Iran gentar dan terus melanjutkan pengembangan energy nuklirnya.

Dalam permasalahan program nuklir Iran terjadi perubahan kebijakan dari Presiden Bush ke Presiden Obama. Semenjak terpilihnya Obama, ia mengutarakan keinginannya untuk menjalin hubungan baik dengan Negara-negara muslim yang sempat buruk. Obama ingin mengawali dengan membuka perundingan dalam forum internasional. Obama bahkan memasukan Amerika

Serikat dalam perundingan terkait program nuklir Iran bersama Uni Eropa-3 yakni Inggris, Prancis, dan Jerman. Obama menilai bahwa dengan kesepakatan tersebut Amerika Serikat dapat mencapai kepentingan nasionalnya untuk melucuti kekhawatiran terkait senjata nuklir, hal ini penting agar keamanan internasional dapat terjaga dan Amerika Serikat dapat kembali mendapat keuntungan berhubungan dengan Iran dan negara-negara Timur Tengah kembali setelah mendapat kepercayaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dipengaruhi oleh aspek dalam negeri, ekonomi dan militer juga konteks internasional. Mengenai aspek dalam negeri perubahan tersebut dipengaruhi oleh adanya dukungan dari partai demokrat yang menginginkan adanya penyelesaian yang menguntungkan untuk Amerika Serikat dengan menyetujui perjanjian JCPOA Amerika Serikat mencabut sanksi-sanksi dari Iran. Namun pertentangan dari lobi yahudi yang tidak menginginkan perjanjian tersebut terjadi dikarenakan Iran akan menjadi ancaman besar apabila diijinkan mengembangkan nuklir. Pada aspek ekonomi dan militer, Amerika Serikat menginginkan minyak Iran yang dapat menyuplai kembali untuk Amerika Serikat. Amerika Serikat berambisi menjadi penguasa tunggal Iran dengan menyingkirkan pesaing bisnisnya seperti Inggris, Jerman, Rusia, Tiongkok, Prancis dengan cara mengancam memberi sanksi pada negara yang berinvestasi di Iran. Setelah Negara-negara lain mencabut investasi Amerika Serikat kembali menjalin hubungan baik dengan Iran. Amerika Serikat berkali-kali mengancam akan melakukan serangan militer ke Iran namun diketahui hal tersebut tidak akan terjadi karena mendapat kontra dari Negara

Dewan Keamanan seperti Rusia dan Tiongkok yang mendukung program nuklir Iran. Sebelum penyerangan militer Amerika Serikat harus mempertimbangkan posisi Iran sebagai produsen minyak dunia yang dibutuhkan Amerika Serikat sebagai, dan penutupan Selat Hormuz yang menjadi lading kilang minyak Iran. Terakhir aspek internasional merupakan bentuk tekanan untuk Amerika dari kalangan internasional. Secara geografis letak Iran yang berada di Timur Tengah menjadi ancaman bagi Israel negara sekutu Amerika Serikat. Israel yang juga mengembangkan nuklir akan mempunyai saingan berat. Dukungan dari Rusia dan Tiongkok dengan alasan rasional seperti tidak pernah dibuktikan secara valid bahwa Iran mengembangkan nuklir pun menjadi bahan pertimbangan Amerika Serikat yang menghabiskan waktu untuk menentang program tersebut.

Dengan penelitin tentang Kepentingan Nasional Amerika Serikat dalam *Joint Comprehensive Plan of Action* pada tahun 2015 ini penulis berharap dapat menjadi rujukan mahasiswa Hubungan Internasional dalam meneliti kebijakan Amerika Serikat.